

## DAFTAR PUSTAKA

### I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Undang-Undang nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Undang – Undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004

Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1973 tentang Acara penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 tentang Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 38 tahun 1998 tentang Pemanfaatan tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN nomor 22 tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Peraturan Meneg. Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal
- Keputusan Menteri Negara Agraria nomor 21 tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 400-3972 tanggal 27 Desember 1993 tentang Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN nomor 22 tahun 1993
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 110-2871, tanggal 8 Oktober 1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing.

Surat Keputusan Gubernur nomor 540 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi / Lahan Atas Bidang Tanah Untuk Pembangunan Fisik Kota Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Surat Keputusan Gubernur DKI nomor 640 tahun 1992 tentang Ketentuan Terhadap Pembebasan Lokasi / Lahan Tanpa Izin dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## II. BUKU-BUKU

Chomzah , Ali Achmad, Seri Hukum Pertanahan I; Pemberian Hak atas Tanah Negara; dan Seri Hukum Pertanahan II; Sertifikat dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002.

\_\_\_\_\_ Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 1, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_ Seri Hukum Pertanahan III; Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah; dan Seri Hukum Pertanahan IV; Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003.

Encyclopedia Americana , Grolier Incorporated, Danbury, Connecticut, Edition 1998.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, PT. Delta Pamungkas, Jakarta, 2004, Jilid 7.

Fauzi, Noer , Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global, Insist Press, Yogyakarta, 2003.

Garner , Bryan A , Editor in Chief, Black Law Dictionary, Seventh Edition, St APaul, Minn, 1999.

Harsono, Boedi , Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya , Jambatan , Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_ Menuju Penyempunaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.

Hutagalung , S. Arie, Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

- \_\_\_\_\_, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (suatu kumpulan karangan), Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Kallo , Erwin Aplikasi Hukum Dalam Bisnis Properti di Indonesia , Ombak, Yogyakarta, 2004.
- Mahendra, A.A. Oka, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Muljadi , Kartini dan Widjaja ,Gunawan , Hak-Hak atas Tanah, , Kencana, Jakarta 2004.
- Pelzer, Karl J Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991.
- Saleng , H. Abrar , , SH, MH, Hukum Pertambangan, UII Press Yogyakarta, 2004.
- Soetrisno, D, Petunjuk Praktis Tata Cara Perolehan Tanah untuk Industri, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Sofwan , Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hak Jaminan atas Tanah, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Sofwan , Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata: Hukum Benda., Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Soimin , Sudaryo, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sudiyat, Iman, Asas – Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar , Liberty, , Yoyakarta , 1982.
- Sumardjono , Maria, S.W., Kebijakan Pertanahan , Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2001.
- Supomo , R, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Penerbit Padnya Paramita, Jakarta, 1981.
- Ter Haar, Bzn, B Asas-Asas dan susunan Hukum Adat , diindonesiakan oleh K. Poeponoto, Ng. Soebakti, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Utomo , Tri Widodo, Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah , Navila, Yogyakarta, 2002.

Wignjodipoero, Soerojo , Pengantar dan Asas –Asas Hukum Adat, PT Gunung Agung, , Jakarta, 1984.

### **III. REFERENSI-REFERENSI LAINNYA :**

Harian Kompas, edisi Sabtu, 3 Mei 2003..

Harian Kompas, edisi Kamis, 2 Desember 2004.

Sumantri , Arie Sukanti , Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, pidato pada upacara pengukuhan guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Agraria, fakultas hukum Universitas Indonesia.

Hutagalung, S. Arie, Sujadi, Supajo dan Nurwidari , Rahayu, Asas-Asas Hukum Agraria, Bahan Bacaan Pelengkap Perkuliahan Hukum Agraria, Jakarta, 2000.

Simanungkalit , Panangian, Asas-Asas Bisnis Properti, makalah untuk Pelatihan Bisnis Properti, ( In House ) di PT. Aneka Berkat Sukses, Jakarta, 20 Oktober 1997.